

BUDAYA SEKOLAH: "NGUMPULKE BALUNG PISAH" MELALUI
PENGAJARAN MULTIKULTUR (*MULTICULTURAL INSTRUCTION*)

Oleh: Cipi Safruddin Abd. Jabar¹

Abstrak

Indonesia terkenal bangsa yang plural. Pluralisme kebudayaan yang selama ini kita anut sering dihiasi dengan percikan-percikan api perpecahan yang cukup menyayat hati. Sejak dari jaman pra kemerdekaan sampai dengan detik ini, konflik yang bernuansakan SARA masih terus terjadi. Ada kesan, Jargon Bhineka Tunggal Ika hanyalah hiasan lapuk penghias lambang kebesaran negara, Garuda Pancasila.

Pendidikan kita tidak mengakomodasi keragaman budaya ini secara utuh. Sejak dini peserta didik hanya diberi pengetahuan tentang budaya, bukan bagaimana menginternalisasikan kedalam diri perindividu anak. Penonjolan budaya mayoritas menyebabkan superioritas atas kebiasaan (baca: budaya) orang lain yang minoritas. Seharusnya, sejak dini peserta didik diberi pengetahuan yang utuh tentang kebiasaan-kebiasaan yang ada pada tiap-tiap anak, serta keragaman budaya orang lain di Nusantara ini, bahkan kebudayaan global. Diharapkan, pendidikan tidak hanya sebagai transfer pengetahuan tentang kebudayaan, tapi juga harus mampu memberikan kesempatan pada peserta didik untuk belajar menginternalisasikan budaya orang lain, belajar mencintai dan memahaminya. Disini, format pendidikan multikultur sangat dibutuhkan. Peran sekolah sangat dinantikan didalam menjawab permasalahan perpecahan antar bangsa di negeri ini. Sampai sejauhmana pendidikan kita menjawabnya?

Pendahuluan

Setelah propinsi ke-27 (Timor Timur) berpisah dari negara kesatuan Republik Indonesia, masalah-masalah yang berbau disintegrasi mulai dari skala yang kecil sampai dengan skala yang besar – yang sebelumnya belum begitu terkuak ke permukaan-- muncul ke permukaan. Masalah Aceh, Papua, Kepulauan Riau, Sampang, Pontianak, Sampit, Maluku, dan banyak lagi merupakan indikator dari permasalahan disintegrasi bangsa ini. Kalkulasi kerugian material maupun non material akibat gejolak sosial seperti di atas sangat besar. Belum lagi dampak penyertanya; laju inflasi, fluktuasi valuta asing, harga saham, sampai dengan

Akumulasi dari tekanan uniformitas kaku menyebabkan *euforia* kebebasan yang tidak berujung. Kebebasan dalam berdemokrasi –yang kadang cenderung anarkhis- ditafsirkan bermacam-macam, “demokrasi *a’la* Indonesia”. Banyak pihak yang mengatasnamakan demokrasi dan kebebasan berbuat seolah sekehendaknya, melanggar hak azasi orang lain. Padahal, mereka memperjuangkan hak azasi manusia.

Budaya uniformitas, baik yang sifatnya politis maupun tidak, menggema di semua aspek-aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Termasuk pendidikan. Dari kurikulum sampai dengan aspek-aspek manajerial serba seragam. Dengan dalih stabilitas nasional, uniformitas di tengah-tengah masyarakat ditegakkan. Dan memang, stabilitas nasional bisa dijaga. Kita bisa lihat dan rasakan bagaimana hidup kita ketika berada di era rezim orde baru sampai dengan era reformasi sekarang ini. Rezim yang berkuasa saat itu mampu menjaga stabilitas nasional dengan menerapkan budaya seragam yang ketat dan tegak.

Kondisi “*adem ayem*” sepertinya merupakan mimpi-mimpi sekarang ini. Inilah dinamika kebebasan di era reformasi. Masyarakat baru terbebas dari rasa terkekang. Model demokrasi yang dikembangkan diterapkan dengan cara-caranya sendiri. Dengan tekad mempertahankan hak azasi, masyarakat cenderung memaksakan kehendak terhadap orang lain, atau dalam hal pelanggaran hukum. Penegak hukum di mata masyarakat di era reformasi didefinisikan (bentuk stereotype masyarakat terhadap aparat) sebagai aparat yang menghalangi demokrasi, korup, dan cenderung tidak dihargai.

Perlunya Perubahan Paradigma Pendidikan

Tidak bisa dipungkiri, pendidikan masyarakat yang diselenggarakan sekarang ini belum mampu menjawab semua harapan-harapan semua pihak. Permasalahan ketidaksiapan lulusan di tempat kerja, insustainabilitas kurikulum rendah dari satu jenjang tingkatan ke jenjang tingkatan selanjutnya, tingkat pengangguran yang tinggi, tingkatan *drop out* yang besar, degradasi moralitas bangsa yang tercermin dari

besarnya kasus kehamilan pada siswi, narkoba, kriminalitas, tawuran antar pelajar, HIV/AIDS, dan banyak lagi.

Ketidakberhasilan pendidikan dalam menjawab semua harapan-harapan masyarakat memiliki banyak dimensi penyebabnya. Selain faktor internal, faktor eksternal juga sangat berpengaruh. *Faktor internal* berkaitan dengan ketidakjelasan filosofi pendidikan yang dianut oleh sekolah; filosofi pendidikan yang dianut sekolah seperti idealis konseptualis, tidak terpajan pada kondisi anak perindividual dan semua aspek terkait dengannya secara riil. Akibatnya, desain kurikulum yang dikembangkan sekolah tidak menyentuh aspek-aspek pendidikan riil lingkungan siswa secara individual. Padahal, konsep pendidikan yang berbasis pada siswa (*student centered*) sudah menjadi topik yang seperti usang untuk dibahas, tapi pada kenyataannya, jargon riil pendidikan yang berbasis pada siswa tidak pernah terimplisitkan dalam kurikulum secara lengkap. Konsep kurikulum muatan lokal tidak bisa menjawab permasalahan di atas. Kurikulum muatan lokal cenderung diterjemahkan sebagai wahana mengenal serta menggali potensi di sekitar sekolah atau konsep trend di masyarakat. Seharusnya, jika pendidikan menerapkan pendekatan student-centered yang seutuhnya, maka dengan serta merta semua pengalaman, perspektif, dan ide-ide para siswa akan dibawa ke dalam pengalaman pendidikan (Paul Gorsky, 2001:5).

Pada dasarnya, kurikulum nasional yang dialirkan pusat ke unit satuan terkecil bersifat 'agak' fleksibel. Seharusnya penguasa wilayah dan sekolah mampu menterjemahkan kurikulum itu ke dalam bentuk yang sangat praktis dengan keadaan karakteristik siswa secara individual. Keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki daerah dan sekolah-sekolah merupakan faktor penghambat kurikulum yang bersifat *student centered*.

Faktor eksternal yang menyebabkan sekolah/dunia pendidikan tidak mampu mewujudkan harapan masyarakat yang dibeban adalah bervariasinya opini masyarakat terhadap pendidikan itu sendiri. Sebagian masyarakat ada yang memandang bahwa

tuntutan masyarakat sudah bertambah lagi. Kurikulum yang diterapkan sudah agak tidak sinkron dengan keadaan jaman ketika kurikulum itu diimplementasikan.

Pendidikan sebagai salah satu lembaga yang harus pula ikut bertanggungjawab atas fenomena sosial yang berkembang di negara kesatuan Republik Indonesia sekarang ini. Disintegrasi bangsa yang sekarang ini menggejala di tengah saudara-saudara kita halus dilihat secara bijaksana.

Melihat kembali ke belakang tentang sistem pendidikan yang telah kita rancang adalah salah satu jawaban yang bijaksana. Sampai sejauhmana pendidikan mampu melestarikan budaya bangsa, dan semangat kebersamaan selama ini? Dalam konteks seperti apakah kita ikut dalam memelihara semangat kebersamaan dan keragaman diantara kita? Apakah pernah terbersit di benak kita, apakah kalangan pendidikan harus turut campur dalam masalah disintegrasi bangsa?

Prinsip kebhinekaan yang sinerap dalam konteks pendidikan penulis pandang tidak mendukung filosofi kebhinekaan itu sendiri. Sekolah malah diarahkan untuk mengeksploitir kekhasan daerah (implementasi mulok) yang antara satu daerah dengan daerah yang lain relatif berbeda. Dengan didukung "semboyan mengembangkan budaya daerah demi memajukan budaya nasional" prinsip kebhinekaan itu diterapkan. Akibatnya, semangat primordialisme kedaerahan, kesukuan, politis, figur, ekonomis, dan keagamaan yang berkembang di tengah masyarakat/anak didik berkembang secara semu dan merupakan *canon ball* yang bisa dijadikan alat penghancur sesama saudara kita. Dari beberapa pengamatan, peserta didik suku minoritas merasa terbebani dengan adanya mata pelajaran yang bersifat kedaerahan, misalnya bahasa daerah. Mereka cenderung tidak menyukai dan prestasi belajarnya pun kurang memuaskan, mereka cenderung menghindari bahkan membenci pelajaran tersebut. Anak diarahkan untuk hanya sekedar "tahu" akan budaya orang lain, tidak diarahkan untuk mengapresiasi, mendalami dan mencintai tanpa harus melupakan budayanya sendiri.

menyukai, dan mendalami satu atau banyak kebudayaan. Misalnya, sistem nilai, gaya hidup, bahasa, dan banyak lagi. Selain itu pula, pengajaran multikultur menekankan pula peran individu sebagai warga negara perseorangan untuk ikut berkontribusi dan terlibat dalam budaya umum negara.

Berkaitan dengan konsep pengajaran multikultur, Banks (Baker, 1994:12) mengungkapkan bahwa ada tiga hal dalam pengajaran yang berbasis multikultur, yaitu: ide atau konsep; pergerakan reformasi pendidikan, dan suatu proses. Lebih lanjut ia menyatakan bahwa pengajaran multikultur memadukan ide siswa yang memiliki latar kelamin, kelas sosial, suku, ras, atau karakter budaya beragam untuk bisa sama-sama memiliki kesempatan belajar di sekolah. Jelaslah, bahwa pengajaran multikultur menghendaki pembelajaran yang kaya akan perbedaan-perbedaan akan kebiasaan dan budaya di antara peserta didik, mereka saling berbagi perbedaan, saling merasakan, saling mengapresiasi, memahami, dan saling mendukung, tanpa mempertimbangkan dominasi atau minoritas

Tujuan dari pengajaran multikultur adalah membantu siswa menjadi mawas diri sebagai pribadi, sebagai bagian dari budaya, dan budaya lainnya. Pemahaman dan mawas diri mengenai keragaman budaya akan membantu siswa hidup seiring-sejalan (harmonis) di tengah-tengah keragaman. Selain itu, pengajaran multikultur memberikan wawasan dan keterampilan pada siswa mengenai budaya yang lain. Diharapkan dengan itu, siswa mampu menambah wawasan, dan bisa berperilaku objektif. Ia bisa mengerti arti sebuah kerja sama bagi kehidupan, menyadari bahwa untuk bisa bertahan hidup tergantung pada wawasan dan pengetahuan tentang orang lain dan penghargaan kebiasaan orang lain. Juga, pengajaran multikultur diharapkan mampu mendorong individu untuk mendukung dan berpartisipasi dalam suatu ragam budaya yang berbeda.

Pengajaran yang berbasis multibudaya, persiapan mengajar di kelas harus dirancang mengacu pada latar belakang siswa yang akan diajar. Kalau kita menelaah ke belakang, konsep *integrated-curricula* bisa diterapkan dalam pengajaran

multibudaya ini dalam konteks budaya dan kebiasaan anak. Artinya, aspek-aspek materi yang akan diajarkan pada siswa dihubungkan dengan kebiasaan dan budaya anak per individu di kelas itu. Tidak terbatas pada ilmu-ilmu tentang sosial kemasyarakatan, ilmu eksakta, seni dan olah raga juga bisa direkayasa menjadi pengajaran multibudaya. Mulai dari pemilihan metode sampai dengan fasilitas pengajaran bisa dihubungkan dengan perbedaan-perbedaan individu.

Pengajaran yang berbasis multikultur harus diawali di keluarga. Antara satu keluarga dengan keluarga dalam suatu kampung, lingkungan, atau daerah akan memiliki keragaman kebiasaan/budaya. Dengan sejak dini anak dikenalkan dengan keragaman keluarga orang lain, suku lain, atau bangsa lain, diharapkan anak sejak dini sudah mengenal keragaman yang ada di sekitarnya. Begitu ia masuk TK ia sudah tidak asing apabila ia berhubungan dengan teman yang tidak sama latar belakangnya. Ia tidak akan merasa aneh dan asing atau mungkin menolak untuk berhubungan dengan teman yang tidak sama latar belakang budaya dan kebiasaannya. Kebersamaan bisa dipupuk di sana!

Proses pengajaran multikultur harus dimulai dari pengalaman yang paling pertama ketika siswa masuk ke sekolah. Ketika ia baru mengenal lingkungan barunya (sekolah baru) ia sudah langsung merasakan nuansa masyarakat multikultur. Sejak dini anak harus dikenalkan dengan perbedaan orang lain, ini akan menanamkan pemahaman tentang orang lain, adat, kebiasaan, dan budayanya. Sekolah harus mampu mendesain suatu program orientasi yang mampu mereduksi "kekagetan" siswa akan suasana baru, budaya baru, kebiasaan baru, bahasa baru, dialek baru, dan banyak keragaman lainnya.

Implementasi pengajaran multibudaya memerlukan keterlibatan dan komitmen total semua pihak yang terkait dalam setting pendidikan. Unit-unit satuan terkecil, pengawas, kepala sekolah, guru, staf administrasi, Departemen Pendidikan Nasional, dan lembaga pendidikan tinggi (LPTK), dan lembaga swadaya masyarakat harus dilibatkan dalam pengajaran multibudaya. Kepemimpinan manajer kelas,

administrator sekolah, pengawas, masyarakat, dan penguasa wilayah diharapkan mendukung realisasi proses pengajaran yang berbasis multi budaya. Tanpa itu, sia-sia. Mereka harus memahami makna pengajaran yang berbasis multikultur secara menyeluruh. Mereka diharapkan mampu membuat suasana kondusif bagi pengajaran multibudaya.

Kebijakan yang dihasilkan otoritas berwenang mulai dari tingkat unit satuan terkecil (sekolah) sampai dengan pemerintah pusat harus mampu menjamin pengajaran multibudaya secara efektif. Memberikan dasar juridis bagi implementasinya. Kejelasan peraturan memudahkan proses pengajaran multibudaya berlangsung dan sukses di lapangan. Kebijakan praktis dan prosedur yang jelas mampu memfasilitasi semua kebutuhan untuk implementasi pengajaran multibudaya pada semua tingkatan kelas (Baker, 1994:33).

Untuk mengubah kurikulum, nampaknya suatu hal yang sulit dan dampaknya tidak bisa dirasakan secara cepat. Sebaiknya pengajaran multibudaya ini harus sejak dini harus dibudayakan oleh sekolah. Kepala Sekolah dan Guru harus memiliki inisiatif memasukkan unsur-unsur paham multikultur dalam pembelajarannya. Tidak hanya terbatas pada pemberdayaan muatan lokal, semua mata pelajaran bisa dikaitkan dengan pengajaran yang sifatnya multibudaya. Disini, perlu usaha yang sistematis dari semua pihak yang terkait dengan pembelajaran di sekolah.

Pembudayaan pendidikan yang bernuansa multibudaya, tidak hanya dirancang pada substansi kurikulum atau mata pelajaran, setting dan kondisi sekolah juga bisa *disetting* mencerminkan keragaman budaya. Contohnya pola pendidikan di negara-negara maju. Sejak pendidikan pra sekolah, anak-anak sudah dikenalkan dengan kebudayaan orang lain. Bagaimana cara hidup, bahasa, kesenian dan kebudayaan, ras, teknologi bangsa lain dikenalkan kepada mereka. Mereka diajak untuk mengapresiasi, merasakan, dan mempelajari budaya-budaya itu.

Mengajarkan materi yang berbasis multibudaya dan multikebiasaan perlu persiapan yang matang, logis, dan sistematis. Setelah mendesain kurikulum, personel

yang akan mengimplementasikannya (guru) perlu dipersiapkan pula. Tanpa persiapan yang matang, dimungkinkan guru akan memberikan wawasan dan pengetahuan yang kontra produktif dengan faham pengajaran multibudaya. Kenyataannya, penulis melihat ada kecenderungan kurikulum diterapkan tanpa memberikan informasi yang akurat tentang perbedaan ras, kesukuan, dan budaya. Ketidakbisaan guru memberikan informasi di atas akan membuat pemahaman siswa terbelenggu untuk memahami ketidakseragaman yang ada di lingkungannya.

Dalam membudayakan pendidikan multikultur, guru diharapkan untuk merubah perilaku negatif anak terhadap ketidakseragaman yang ada di lingkungan mereka. Selain itu, pada saat yang sama guru juga bertanggung jawab membangun pengalaman pembelajaran kedalam proses pendidikan yang akan meningkatkan perilaku positif mengenai perbedaan ras, suku, dan budaya. Penelitian Clark dkk. (Baker, 1994: 67) menemukan bahwa anak datang ke sekolah membawa sikap negatif yang sudah melembaga dalam benaknya tentang orang-orang yang ada di sekitar dia. Guru dan sekolah memiliki tanggung jawab untuk mempersiapkan siswa bagaimana cara hidup dalam alam demokrasi. Oleh karena itu, mereka harus mendidik siswa bagaimana hidup dan bagaimana cara berhubungan dengan orang-orang dari semua ragam budaya. Siswa perlu memahami perbedaan dan bagaimana menghargai nilai gaya hidup, budaya, agama, dan bahasa yang berbeda dari yang dimiliki siswa.

Persiapan guru untuk mengajarkan pengajaran multibudaya tidak hanya memanfaatkan pendidikan in service, tapi harus sejak dini ketika calon-calon guru itu masih di bangku kuliah. Artinya, kurikulum di LPTK harus sedemikian rupa ditata dan diorganisir ke dalam bentuk pengajaran multibudaya.

Otonomi Daerah Versus Pendidikan Multikultur

Dengan digulirkannya Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah genderang otonomi daerah mulai ditabuh. Rasa pesimistis dan optimistis menghiasi jalannya implementasi undang-undang tersebut. Dengan asumsi

menjawab ketidakadilan distribusi kekuasaan antara pusat dengan daerah undang-undang ini diharapkan mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi daerah. Pesimistisnya, banyak sekali kendala yang dihadapi daerah dalam menerapkan undang-undang tersebut di lapangan. Mulai dari ketidaksiapan SDM sampai dengan sumber daya yang lain, undang-undang ini seolah-oleh menjadi momok bagi daerah untuk berkembang dengan misi dan visi yang baru. Polemik terjadi, yang mengharuskan secepatnya harus diimplementasikan sampai dengan harus ditunda. Perbedaan interpretasi undang-undang juga menghiasi pelaksanaannya.

Berkaitan dengan pendidikan, penulis merasa ada pesimisme dalam penerapannya dalam bidang pendidikan, khususnya berkaitan dengan implementasi kurikulum. Ditakutkan daerah yang satu dengan yang lain sudah tidak saling peduli, sibuk dengan urusan dalam daerah masing-masing. Masing-masing ingin mengembangkan daerahnya sendiri. Mereka menggali semua potensi budaya yang dimiliki, dan dikenalkan kepada siswa bukan dalam kerangka kebangsaan, berbhineka tunggal ika. Kebiasaan dan budaya daerah lain bukan urusan daerah, tidak perlu dikenalkan dalam kurikulum sekolah.

Walaupun kurikulum nasional masih merupakan barometer dan parameter sistem pendidikan nasional, fleksibilitas yang dimiliki kurikulum nasional tersebut cenderung ditanggapi secara sempit. Muatan lokal misalnya, dari mulai dikenalkan sampai dengan sekarang sepertinya masih berjalan seperti itu, mengeksploitir satu kelompok kebiasaan dan budaya saja. Mendidik berbudaya dan berkebiasaan tunggal, tidak peduli dengan lingkungan yang berbeda, primordial. Sekolah hanya mengajarkan toleransi, bukan memberikan wawasan dan pengetahuan serta pemahaman tentang budaya orang lain. Rasa nasionalisme kurang bisa diakomodasi jika penyelenggaraan kurikulum seperti itu.

Penutup

Kerja sama antar daerah dalam pengembangan kurikulum yang berbasis pada pendidikan yang multikultur perlu dilakukan. Diharapkan kurikulum yang dikembangkan dilandasi dengan semangat kebersamaan dalam perbedaan, *bhineka tunggal ika*, dan membangun suatu budaya umum bangsa Indonesia, tidak terkotak-kotak. Undang-undang nomor 22 di atas memfasilitas daerah untuk melakukan kerja sama seperti itu. Ini merupakan momen penting bagi daerah untuk melakukan *sharing* budaya dan kebiasaan bagi basis pengetahuan siswa-siswa.

Daftar Pustaka

- Cozza, B. and Mbugua, T. (2000) *Transforming the Culture of The Family, School, and University Through Collaboration*. Electronic Magazine of Multicultural Education [online].vol 2. 2(2), 28 paragraphs. http://www.eastern.edu/publications/emme/2000fall/cozza_mbugua.html>[2001,02]
- Gorski, Paul (2001) *Multicultural Education and The Internet: Tools, Resources, and Commentary* .<http://www.home.earthlink.net/~gorski>
- Gwendolyn C. Baker (1994) *Planning and Organizing for Multicultural Instruction*. Second edition. California: Addison-Wesley Publishing Company.
- Undang-undang Otonomi Daerah.(2001) Yogyakarta: J&J Learning Yogyakarta